

### **6.1. Kesimpulan**

Secara Geografis, areal HPH PT Pitco Indonesia berada dalam dua wilayah kecamatan. Areal sebelah utara,  $\pm 70\%$  berada di wilayah kecamatan Pauh dan areal sebelah selatan  $\pm 30\%$  berada di wilayah kecamatan Sarolangun. Di dua kecamatan ini sebagian besar penduduknya mata pencahariannya adalah petani. Jumlah petani di kecamatan Sarolangun dan Pauh, masing-masing adalah 13.119 orang (59,83%) dan 23.598 orang (71%).

Tradisi bertani dengan cara tebas-bakar (slash-and- burn agricultural) bagi penduduk desa-desa sekitar hutan produksi yang dikelola HPH PT Pitco Indonesia, telah merupakan tradisi bertani yang dikenal secara turun- temurun.

Hadirnya HPH PT Pitco Indonesia yang mengeksploitasi hutan produksi di wilayah kecamatan Pauh dan Sarolangun, bagi petani yang biasa merambah hutan dari satu sisi menguntungkan mempermudah perambah masuk ke areal hutan produksi. Dengan memanfaatkan jalan HPH, baik jalan cabang maupun jalan induk, para petani semakin gampang dalam membuat ladang atau kebun karet di kiri-kanan jalan HPH. Luas ladang/kebun karet perambah di areal HPH PT Pitco Indonesia rata-rata 8,05 ha per KK. Tiap KK per tahun merambah hutan rata-rata seluas 2,18 ha. Sedangkan luas hutan yang dikonversi menjadi ladang/kebun karet oleh seluruh perambah yang ada di areal HPH ini adalah seluas 5.572,08 ha. Saat ini (1989) di areal hutan produksi yang dikelola HPH PT Pitco Indonesia yang luasnya 76.000 ha, seluas 20.580 ha berupa ladang (550 ha) dan kebun karet (20.030 ha).



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

IDENTIFIKASI MASALAH PERAMBAHAN OLEH MASYARAKAT SEKITAR HUTAN: STUDI KASUS DI  
AREAL HUTAN PRODUKSI  
HPH PT PITCO JAMBI, INDONESIA  
Suporahardjo, Prof. Dr. Ir. H. Achmad Sumitro

Universitas Gadjah Mada, 1991 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

## Meningkatnya laju kecepatan perambahan di areal hutan produksi

HPH PT Pitco Indonesia ini karena didukung oleh tiga faktor. Yaitu, 1) hutan bersifat terbuka; 2) keuntungan ekonomi; dan 3) biaya usaha tani-perambahan yang relatif murah.

Kegiatan perambahan bagi masyarakat desa-desa sekitar hutan produksi HPH PT Pitco Indonesia sangat menguntungkan. Karena dengan melakukan perambahan, perambah mendapatkan padi dari hasil panen ladangnya--rata-rata 1,2 ton dan dalam jangka panjang sang perambah akan memiliki kebun karet yang semakin luas.

Dari 50 responden, 24%-nya (12 responden) selain berladang/membuat kebun karet juga terlibat aktivitas penjualan kayu berbalok/gesek, buruh angkut, penunjuk lokasi pohon-pohon komersial. Sedangkan 10% (5 responden) selain berladang juga mengumpulkan hasil hutan non-kayu.

Perambah di areal kerja HPH PT Pitco Indonesia adalah penduduk desa sekitar kawasan tersebut dan penduduk pendatang Jawa (18%), Palembang (10%), Batak (2%)--yang telah menjadi penduduk desa setempat.

Teknik menebang yang semula menggunakan alat sederhana seperti kapak (beliung), telah mulai ditinggalkan dan beralih menggunakan gergaji mesin (chainsaw). Dari 40 responden yang membuka hutan, sebanyak 17 responden (42,5%) menebang dengan menggunakan gergaji mesin, dan sebanyak 23 responden (57,5%) menggunakan beliung.

Perkembangan ladang/kebun karet rakyat yang luasnya telah mencapai 27,08% luas seluruh kawasan hutan produksi HPH PT Pitco Indonesia, semakin mengaburkan batas-batas areal kerja HPH tersebut dengan lahan-lahan milik penduduk desa-desa sekitarnya. Akibatnya



pelaksanaan TPTI di areal yang telah dirambah, pemeliharaan tegakan sisa untuk rotasi tebangan berikutnya tidak dapat dipraktekkan.

Potensi kayu komersiil yang musnah akibat perluasan ladang/kebun karet di kawasan hutan produksi yang dikelola HPH PT Pitco Indonesia tiap tahun  $\pm 482.204,036 \text{ m}^3$  untuk kayu berdiameter 50 cm. Sedangkan untuk kayu berdiameter 20-49 cm adalah  $\pm 82.745,388 \text{ m}^3$ . Total potensi kayu komersiil--jenis dipterocarp--yang musnah tiap tahun akibat perambahan senilai  $\pm \text{Rp.}33,90$  milyar.

## 6.2 Saran

1. Untuk mengurangi kegiatan perambahan oleh penduduk desa sekitar kawasan HPH, pihak HPH perlu memperjelas batas-batas areal kerja dengan areal jelajah perladangan penduduk setempat.
2. Pemerintah perlu mengakomodir dan mengendalikan kegiatan perladangan/perambahan yang telah menjadi tradisi di kawasan tersebut, agar tidak bersifat destruktif bagi kelestarian hutan produksi.
3. Pihak pemerintah perlu melaksanakan sangsi yang tegas terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam jaringan tata niaga kayu yang berasal dari penebangan ilegal.
4. Pihak HPH harus meningkatkan intensitas kegiatan pemeliharaan dan perlindungan terhadap bekas tebangannya agar tidak dirambah oleh penduduk setempat.